

Gubernur Banten Diminta Abaikan Usulan Perusahaan Penangguh UMK

written by Kabar 6 | 7 Januari 2013



✘ Kabar6-Persoalan yang melilit tubuh perburuhan seolah tak pernah usai. Kali ini, sedikitnya 53 perusahaan yang tersebar di wilayah Kabupaten Tangerang, menangguhkan pembayaran Upah Minimum Kabupaten (UMK).

Atas penangguhan pembayaran UMK sebesar Rp2,2 juta yang rencananya diberlakukan pemerintah pada awal tahun ini, sejumlah Serikat Buruh meminta Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah, untuk mengabaikan usulan puluhan perusahaan penangguh UMK tersebut.

Informasi yang diperoleh Kabar6.com Senin (7/1/2013), sebanyak 53 perusahaan di daerah berjuluk kota seribu industri ini, telah mengajukan penangguhan UMK.

Penangguhan UMK tersebut, informasinya telah diplenokan di tingkat Provinsi Banten dan saat ini tinggal menunggu persetujuan atau teken dari Gubernur setempat.

“Sebelum meneken, selayaknya Gubernur Banten harus terlebih dahulu memperhatikan kondisi riil di perusahaan, seperti

menginvestigasi langsung ke lokasi, agar keputusan tersebut objektif,” ungkap Ketua KSPSI Kabupaten Tangerang, Ahmad Supriyadi.

Dikatakan Supriyadi, pihaknya tak mempersoalkan jika pihak perusahaan menanggihkan UMK. Namun, penanggihan UMK itu harus sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi di perusahaan tersebut.

“Itu salah satu sikap agar perusahaan lebih berkesinambungan melihat upah yang memang naik drastis,” katanya.

Disamping itu lanjutnya, perusahaan yang layak melakukan penanggihan itu yakni, perusahaan padat karya atau low margin.

“Justru itu Gubernur Banten meski jeli dan tidak asal menekan penanggihan kepada perusahaan yang padat modal, sebab dikuatirkan ada perusahaan yang hanya mengklaim tidak mampu saja,” tuturnya.

Senada, Ketua KSPSI Bojong, Cikupa, Imam Sukarsa mengatakan, dirinya juga tak keberatan atas penanggihan UMK tersebut. “Sepanjang memenuhi syarat dan yang terpenting para pekerja bisa bekerja,” tandasnya.

Dia berharap, Gubernur Banten tidak langsung menyetujui atau menandatangani usulan itu. Pemprov Banten, tentunya harus meninjau kembali usulan itu, sebelum mengeluarkan keputusan.

Seperti, meneliti lebih jauh akan kondisi keuangan perusahaan itu, sehingga bisa mencegah potensi perusahaan yang hanya ikut-ikutan melakukan penanggihan.

“Memang tidak sedikit perusahaan yang tak mampu, tapi banyak pula perusahaan yang memang tidak mau membayar sesuai UMK 2013,” ucapnya. (din)

Pegawai Pemkab Tangerang Dukung Sanksi Pemotongan TPP

written by Kabar 6 | 7 Januari 2013



✖ Kabar6-Sejumlah pegawai di Pemerintahan Daerah Kabupaten Tangerang, mendukung penuh penerapan sanksi pemotongan Tunjangan Prestasi Pegawai (TPP) bagi para pegawai yang telat masuk kantor, mangkir dan lainnya.

Penerapan sanksi pemotongan TPP tersebut, mengacu pada Peraturan Bupati (Perbup) Tangerang Nomor 49/2012 Tentang Disiplin Pegawai.

“Kami sangat setuju dan mendukung rencana Pemkab Tangerang yang bakal menerapkan sanksi pemotongan TPP bagi pegawai yang mangkir dan telat ngantor,” ungkap Ketua Komunitas Pegawai Tangerang (Kupat), Ahmad Hidayat, kepada Kabar6.com, Selasa (8/1/2013).

Menurut staf Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) Kabupaten

Tangerang ini, penerapan sanksi itu dinilai dirinya cukup bagus serta sebuah langkah maju dari pemerintah daerah setempat.

Asal, besaran TPP untuk pegawai di daerah berjuluk kota seribu industri ini, bisa kompetitif atau minimal lebih besar dari Kota Tangerang dan Tangerang Selatan.

“Jangan sampai penerapan sanksi itu malah timbul demotivasi kerja pada pegawai berprestasi,” katanya.

Dan yang terpenting lanjut Dayat, dalam penerapan aturan disiplin kerja itu, harus ada pula unsur keteladanan dari atasannya.

Terpisah, Sekretaris Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Kabupaten Tangerang, Ajad Sudrajat mengatakan, pihaknya mendukung penuh langkah Pemkab Tangerang yang menerapkan sanksi tersebut.

Sanksi itu kata Ajad, setidaknya dapat memacu para pegawai untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.

“Aturan ini, kami pandang positif dan memang harus dilakukan, supaya para pegawai memiliki rasa tanggungjawab terhadap kewajibannya,” tuturnya.(din)

DPRD Minta Pengerjaan Rehab Sekolah di Tangsel Dipercepat

written by Kabar 6 | 7 Januari 2013



✘ Kabar6-Komisi II DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mendesak pihak kontraktor yang menangani rehab gedung sekolah diwilayah itu agar mempercepat pengerjaannya. Hal itu menyusul masih banyaknya proses rehab fisik bangunan sekolah yang belum juga selesai dari target waktu yang ditentukan. Sedianya, batas akhir pengerjaan proyek rehab sekolah itu adalah tanggal 20 Desember 2012 lalu.

“Proyek rehab sekolah harus dikebut. Karena masih banyak yang belum selesai sampai sekarang,” ujar Ketua Komisi II, DPRD Tangsel, Siti Chadijah, disela sidak ke proyek rehab sekolah, Senin (7/1/2013).

Ya, menurut Siti Chadijah, sidak itu sengaja digelar untuk mengawasi kinerja Dinas Pendidikan setempat, sebagai lembaga yang bertanggungjawab dalam hal pendidikan diwilayah itu.

“Tentunya kami tidak ingin, lambannya proyek rehab sekolah itu akan berdampak pada terganggunya aktivitas belajar siswa. Makanya, kami minta pihak kontraktor mempercepat proses penyelesaian proyek,” kata Siti lagi.

Ditanya tentang hasil sidak yang dilakukan, Siti mengaku sampai saat ini proses belajar siswa di sekolah yang sedang dalam proses rehaab masih berjalan lancar dan belum terganggu.


Sementara, perwakilan Dari Dinas Pendidikan Tangsel, Dedi Rafidi mengatakan bahwa ada beberapa kendala yang dihadapi, sehingga proses rehab bangunan sekolah masih banyak yang belum selesai.

Salah satu kendala dimaksud adalah faktor cuaca. Namun demikian, Dinas Pendidikan Kota Tangsel akan terus mendorong kontraktor agar segera menyelesaikan pekerjaannya. (Turnya)

Diduga Penyerangan Staf Kelurahan Cipadu Sudah Direncanakan

written by Kabar 6 | 7 Januari 2013



 Kabar6-Aksi penyerangan yang dilakukan 6 pria bercadar terhadap staf Kelurahan Cipadu, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, diduga kuat sudah direncanakan dengan matang.

Sedangkan sasaran utama dalam penyerangan itu tak lain adalah Sairun (50), Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berstatus staf di kantor kelurahan dimaksud.

Sementara Zahrudin (40), yang belakangan diketahui sebagai petugas keamanan di kantor kelurahan tersebut (sebelumnya ditulis staf), turut menjadi korban karena berupaya menolong Sairun saat diserang.

“sasaran penyerangan itu adalah Sairun. Sedangkan Zahrudin turut menjadi korban sabetan golok karena berupaya menolong Sairun yang sedang diserang. Tidak tertutup kemungkinan penyerangan itu sudah direncanakan,” ujar Kapolsek Ciledug, Kopol Haris Jakin Sik, kepada kabar6.com, Senin (7/1/2013).

Guna mengusut tuntas kasus itu, kata Kapolsek, pihaknya kini masih memintai keterangan dari sejumlah saksi, termasuk kedua korban yang tengah menjalani perawatan di RS Sari Asih Ciledug.

“Ada warga yang sempat melihat dan mencatat nomor polisi dari salah satu sepeda motor yang digunakan pelaku. Saat ini, penyidik tengah berupaya melacak siapa pemilik sepeda motor tersebut,” ujarnya.

Diketahui, 6 pria bercadar tiba-tiba menyerang Sairun (50), salah seorang staf di Kantor Kelurahan Cipadu, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, Senin (7/1/2013) petang.

Akibat penyerangan itu, Sairun dan Zahrudin, menderita luka cukup serius dan harus mendapatkan perawatan intensif di RS Sari Asih Ciledug.(abie)

Tak Ada Peminat, Blangko e-KTP Dilelang Dua Kali

written by Kabar 6 | 7 Januari 2013



✘ Kabar6-Proyek pengadaan blangko Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) senilai Rp22 miliar yang dianggarkan pemerintah Kabupaten Tangerang pada 2012 lalu, diakui panitia lelang memang minim peminat atau tak ada penawar. Sehingga, anggaran yang bersumber dari APBD ini, terpaksa dikembalikan ke kas daerah dan menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa).

Ketua Panitia Lelang Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Tangerang, Deki Kusumayadi mengatakan, proses lelang blangko e-KTP telah dilakukan dirinya sebanyak dua kali.

Pasalnya, saat pelaksanaan tender proyek itu tak satupun perusahaan yang mengajukan penawaran.

“Kami sudah mengadakan lelang paket kegiatan itu sebanyak dua kali sesuai prosedur dan mekanisme yang ada. Namun, tak ada satupun perusahaan yang minat untuk kegiatan ini,” ungkap Deki, kepada Kabar6.com, Senin (7/1/2013).

Minimnya peminat pada proyek ini lanjut Deki, kemungkinan besar terkendala dari sulitnya perusahaan mendapatkan kartu cerdas atau smart card, karena stok barang tersebut belum ada dan harus diimpor dari negara lain.

“Setahu saya, di Indonesia hanya ada 8 perusahaan yang mampu dan memenuhi syarat untuk pengadaan smart card ini diantaranya, PT Mecosuprint, Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) dan lainnya,” ujar Deki.

Selain itu kata Deki, perusahaan tersebut juga harus mengantongi ijin berupa security printing dari Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu (Botasupal).

“Karena tak ada penawar, maka kami ambil sikap melaporkan hal itu ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), sebagai pengusul agenda kegiatan,” katanya.

Ditambahkan Deki, pada dasarnya Pemkab Tangerang sendiri sudah siap melaksanakan program nasional ini. Namun, pemerintah pusat sendiri belum juga merealisasikannya.

Sebagai bukti bahwa Pemkab Tangerang telah siap melaksanakan program e-KTP ini beber Deki, terlihat dari adanya pengadaan printer dan alat rekam e-KTP senilai Rp4,6 miliar.

“Printer dan alat rekam e-KTP itu untuk 29 kecamatan dan seluruh kelurahan/desa yang ada di daerah itu. Kami, hanya melaksanakan tugas untuk melelang paket tersebut. Dan, adapun muncul persoalan teknis bukan menjadi urusan kami,” singkatnya.(din)

2 Staf Kelurahan Cipadu Dibacok 6 Pria Bercadar

written by Kabar 6 | 7 Januari 2013



✘ Kabar6-Dua Pegawai Negeri Sipil (PNS) staf Kelurahan Cipadu, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, diserang 6 pria bercadar di halaman kantor kelurahan tersebut, Senin (7/1/2013) petang.

Belum diketahui persis apa motif dibalik penyerangan itu. Namun, saat ini dua staf kelurahan yang diketahui bernama Sairun (50) dan Zahrudin (40), menderita luka bacok serius dan dirawat di Sari Asih Ciledug.

Sumber kabar6.com di Mapolsek Ciledug menyebutkan, peristiwa berawal ketika sore itu Sairun dan Zahrudin sedang berada di halaman kantornya dan bersiap-siap untuk pulang.

Tiba-tiba muncul 6 pria bercadar yang berboncengan dengan 3 unit sepeda motor. Begitu tiba di lokasi, tanpa basa-basi lagi kawanannya langsung melakukan penyerangan kepada kedua korban secara membabi buta.

Setelah puas melampiaskan amarah dan mendapati korban terkapar bersimbah darah, kawanannya langsung kabur tancap gas menuju arah Ciledug.

Kejadian itu tak urung sempat membuat heboh warga sekitar. Oleh pegawai lainnya, ke dua korban kemudian dilarikan ke RS Sari Asih Ciledug guna mendapatkan penanganan medis.

Sairun sendiri menderita luka bacok serius pada lengan sebelah kiri. Sedangkan Zahrudin menderita luka bacok serius pada pinggang kanan dan kiri.

Guna pengusutan lebih lanjut, kasusnya kemudian dilaporkan ke Polsek Ciledug. Sayangnya, hingga berita ini ditayangkan, belum ada klarifikasi langsung dari pihak Polsek Ciledug. (Abie/yud)

Ini Solusi Kemacetan Akut di Wilayah Polsek Curug

written by Kabar 6 | 7 Januari 2013



✘ Kabar6-Sejumlah titik rawan kemacetan arus lalu lintas di wilayah Curug, kondisinya semakin akut. Selain karena kiat padatnya kendaraan, juga akibat sempitnya ruas jalan. Untuk mengurai kemacetan Dan kepadatan kendaraan ini, Kepolisian Sektor (Polsek) Curug melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kemacetan lalu lintas di wilayahnya.

Kanit Lakalantas Polsek Curug AKP Mudiono mengatakan, sedikitnya ada Tiga titik rawan kemacetan lalu lintas di wilayah Curug, yakni perempatan pondok bambu tepatnya di Jalan Raya Kadu-Curug, pertigaan Bitung Dan pintu masuk Dan keluar tol Bitung.

“Tiga titik ini setiap jam kerja Dan pulang kerja serta jam-jam sibuk sangat padat sekali kendaraan, sehingga kemacetan mencapai akut,” katanya.

Mudiono menjelaskan, solusi mengatasi kemacetan di wilayah Curug ini pihaknya tengah mengadakan kun-kun untuk pembatas

jalan yang berfungsi untuk mengurai kemacetan, pengecatan ruas jalan, Dan lampu peringatan serta perbaikan pos-pos penjagaan lalu lintas.

“Saat ini kegiatan-kegiatan tersebut tengah berjalan. Targetnya akhir Januari sudah rampung,” katanya seraya menambahkan, kendaraan patroli dan kendaraan operasional lalu lintas siap dioperasikan setelah sebelumnya mengalami kerusakan.(dre/*)

Ketua KNPI Tangsel Eeng Sulaiman Siap Digugat

written by Kabar 6 | 7 Januari 2013



✘ Kabar6-Meskipun mendapat protes dari sejumlah Organisasi Kepemudaan, Ketua terpilih KNPI Tangsel hasil Musda II, Eeng Sulaiman bersikap dingin. Bahkan sepertinya, gelombang protes sejumlah OKP tidak berpengaruh.

“Kenapa sih tidak dari kemarin saat pra musda digugat. Kenapa setelah saya terpilih jadi Ketua baru digugat,” ujarnya saat ditemui di rumah makan Ririe Rawa Buntu, Kota Tangsel, Senin (7/1/2013)

Ia menambahkan, musda yang diselenggarakan di Aula Sjafruddin Prawiranegara STIE Ahmad Dahlan, Ciputat Timur, Kota Tangsel pada Jumat (4/1/2013) lalu itu sudah sesuai dengan mekanisme

dan prosedur yang ada.

Adapun gelombang protes yang muncul dari sejumlah Ketua OKP, menurutnya merupakan hal wajar sebagai dinamika organisasi. "Tapi jika yang dipersoalkan masalah legal atau ilegal, saya tidak tahu, silahkan tanya langsung dengan ketua SC dan OC," katanya.

Lanjut Eeng, KNPI sebagai wadah organisasi kepemudaan, dalam pembagian kepengurusan berharap memberikan dukungan kepada saya untuk terus memajukan KNPI Tangsel. "Saya ingin membangun pemuda Tangsel lewat organisasi KNPI ini, kenapa harus ada gugatan" jelasnya

Sebelumnya, calon Kandidat Muji SP akan melayangkan surat pengajuan keberatan yang ditujukan kepada Ketua Umum DPP KNPI Pusat, Ketua umum DPD KNPI Provinsi Banten, Dispora Kota Tangsel.

"Kami menolak keputusan Musda yang cacat hukum ini. Karena, tidak sesuai AD/ART KNPI," kata Muji dari Sapma PP Sabtu (5/1/2013) lalu.

Sementara, Ketua DPD KNPI Provinsi Banten Aden Abdul Kholik mengatakan, bahwa musda KNPI Kota Tangsel memang cacat hukum dari segi batas usia dan itu sudah melanggar AD ART.

Namun, pada pra musda yang diadakan di puspitek beberapa hari yang lalu diputuskan Azas musyawarah untuk mufakat lebih mendominasi ketimbang aturan dalam anggaran dasar-anggaran rumah tangga (AD-ART).

"Memang DPD KNPI Provinsi Banten sudah mewanti-wanti kepada DPD KNPI Kota Tangsel pada pra musda di puspitek. Namun, karena ada kesepakatan bersama antara kandidat maka diambil Azas musyawarah untuk mufakat inilah hasil dari Musda ini. Tapi dari segi aturan Musda ini sudah melanggar AD ART," ujarnya Sabtu (5/1/2013) lalu. (Evan)

Ini Sanksi Bagi PNS Bolos Kerja & Mangkir Apel Pagi

written by Kabar 6 | 7 Januari 2013



✘ Kabar6-Sesuai dengan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 49 Tahun 2012 tentang disiplin pegawai, terdapat beberapa aturan pokok yang kiranya harus diperhatikan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) diwilayah tersebut.

Berkut adalah ancaman sanksi bagi PNS yang kedapatan melanggar aturan seperti bolos kerja dan bolos apel pagi, yang disampaikan Plt Sekda Kabupaten Tangerang, Iskandar Mirsyad, sesuai aturan yang telah ditetapkan.

1. Tidak masuk kerja tanpa ada keterangan yang syah, maka bagi PNS dikenakan sanksi pengurangan TPP sebesar 3 persen per hari dari 100 persen TPP selama sebulan setelah dikurangi pajak.

2. Terlambat masuk kerja dan atau pulang cepat tanpa ada keterangan yang syah, maka bagi PNS dikenakan sanksi pengurangan TPP sebesar 2 persen per hari dari 60 persen TPP sebulan setelah dikurangi pajak.

Apabila seorang PNS terlambat masuk kerja dan atau pulang

cepat tanpa ada keterangan yang syah dalam hari-hari yang sama, maka dikenakan pengurangan TPP sebesar 3 persen per hari dari 60 persen TPP sebulan setelah dikurangi pajak.

3. Tidak mengikuti apel setiap hari senin dan Hari Kesadaran Nasional tanggal 17 tanpa ada keterangan yang syah, maka bagi PNS dikenakan pengurangan TPP sebesar 2,5 persen per hari dari 60 persen TPP sebulan setelah dikurangi pajak.

Apabila dalam satu bulan seorang PNS tidak pernah ikut apel, maka dikenakan pemotongan TPP sebesar 2,5 persen dari 60 persen TPP sebulan setelah dikurangi pajak.

4. Bagi pegawai yang dengan sengaja mengisikan daftar hadir pegawai yang tidak hadir dalam apel, maka baik pegawai yang mengisikan maupun yang diisikan daftar hadirnya dikenakan sanksi 2 kali lipat dari ketentuan pengurangan TPP atas ketidakikutsertaan dalam apel pagi.

5. Dan bagi pegawai tenaga kontrak diberi sanksi sesuai kebijakan atasannya pada SKPD atau unit kerja masing-masing.

Para Kepala SKPD, Camat atau SKPD yang membawahi UPTD, wajib melaporkan setiap bulan pegawai yang tidak melaksanakan apel pagi serta tidak mentaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang syah kepada Sekda melalui BKD dengan tembusan kepada BPKAD.

Khusus untuk Lurah, wajib memberikan laporan secara berkala kepada Camat dengan tembusan kepada Kepala BKD.

Sedangkan bagi Pegawai Tenaga Kerja Kontrak atau pegawai non PNS yang diberikan honorarium dari APBD, diberikan sanksi sesuai kebijakan atasannya pada SKPD atau unit kerja masing-masing sesuai perundang-undangan.

Dan, pegawai dianggap tidak masuk kerja apabila sampai dengan jam 9 tidak menandatangani daftar hadir pegawai atau pulang kerja sebelum pukul 15.30 kecuali dinas luar atau rapat pada sore hari.

Pembinaan terhadap pengaturan hari dan jam kerja dilakukan oleh Kepala SKPD dan Kepala BKD terkait. BKD memiliki kewajiban untuk melakukan monitoring pelaksanaan pengaturan hari dan jam kerja untuk kemudian dievaluasi dan dilaporkan kepada Bupati melalui Sekda.(hms/tom migran)

Langgar Disiplin, TPP PNS Tangerang Bakal Dipangkas

written by Kabar 6 | 7 Januari 2013



Kabar6-Seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang yang tidak disiplin atau sengaja melanggar aturan bakal dikenai sanksi pemotongan Tunjangan Penambahan Penghasilan (TPP).

Disiplin PNS dimaksud berkaitan dengan wajib apel pagi dan ketentuan jam kerja.

Jam masuk kerja pada Hari Senin sampai dengan Kamis dimulai Pukul 08.00, istirahat Pukul 12.00 s.d 12.30 dan pulang kerja Pukul 16.00.

Khusus pada hari Jumat, jam masuk kerja Pukul 08.00 WIB, Istirahat Pukul 11.30 WIB sampai pukul 13.00 WIB dan pulang kerja pukul 17.00 WIB. Setiap PNS wajib mentaati ketentuan jam kerja tersebut dengan mengisi daftar hadir setiap hari kerja dan mesin sidik jari (finger print).

Demikian dikatakan Plt. Sekretris Daerah Iskandar Mirsad dalam

rangka sosialisasi peraturan Bupati Tangerang Nomor 49 tahun 2012, tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin PNS di Kabupaten Tangerang.

“Peraturan ini dibuat sebagai tindak lanjut diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai, serta memberikan kejelasan antara “reward and Punishment” terhadap PNS yang disiplin dan tidak disiplin,” ujar Iskandar Mirsyad, Senin (7/1/2013).

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2012, Iskandar Mirsyad menyatakan ada sanksi pemotongan TPP mulai dari 2 persen sampai 3 persen, bagi setiap PNS yang melanggar aturan.(hms/tom migran)